

BAB 2

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Evaluasi dalam Program Pendidikan Masyarakat

Menurut Djuju Sudjana, (2008, hlm. 4) Program Pendidikan Masyarakat adalah kegiatan sistemik yang didalamnya memiliki komponen yang terdiri atas masukan lingkungan, masukan sarana, masukan mentah, dan masukan lain; memiliki proses yaitu interaksi antar komponen untuk mencapai tujuan program (*output* dan *outcome*). Dalam hal ini berarti program Pendidikan Masyarakat merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang, dilaksanakan, dan diarahkan secara terencana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Karena program ini didalamnya terdiri dari komponen, proses, dan tujuan, maka diperlukan suatu evaluasi program untuk menilai sejauh mana tujuan program dapat tercapai, apakah proses pelaksanaannya sesuai dengan rencana, dan apa hasil yang dirasakan oleh penerima program (Djuju Sudjana, 2008, hlm. 7). Lebih lanjut, Djuju Sudjana (2008, hlm. 12) menjelaskan bahwa selain pada komponen, proses, dan tujuan, evaluasi pada program pendidikan masyarakat juga dilakukan terhadap fungsi-fungsi manajemen program pendidikan masyarakat yang terdiri dari; perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*motivating*), pembinaan (*conforming*), penilaian (*evaluating*), dan pengembangan (*developing*), sehingga dapat diartikan evaluasi pada fungsi-fungsi tersebut termasuk pada evaluasi terhadap proses dan hasil evaluasi program.

Menurut Steele (1977) dalam (Djuju Sudjana, 2008, hlm. 28) terdapat 7 karakteristik evaluasi dalam program pendidikan masyarakat, diantaranya yaitu:

- a. Evaluasi menekankan pada penilaian proses kegiatan yang bersifat umum, bukan hal-hal yang bersifat khusus
- b. Cakupan evaluasi lebih luas daripada sekadar memeriksa tingkat ketercapaian tujuan program
- c. Ruang lingkup evaluasi lebih besar dibandingkan evaluasi yang hanya berfokus pada hasil program

- d. Jangkauannya melampaui evaluasi yang hanya terbatas pada proses pembelajarannya saja
- e. Evaluasi program memiliki perbedaan dengan penelitian evaluatif (*evaluative research*) maupun penelitian tentang program (*program research*).
- f. Evaluasi program berfungsi sebagai bagian dari proses pengelolaan program
- g. Penekanan pada evaluasi program lebih diarahkan pada manusia (*people centered*) yang terlibat dan memiliki keterlibatan dengan program tersebut.

Menurut Djuju Sudjana (2008, hlm. 35) tujuan utama evaluasi dalam program pendidikan masyarakat adalah menyediakan dan menyajikan informasi sebagai acuan untuk mengetahui efektivitas dan dasar dalam pengambilan keputusan terkait program tersebut, tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah tujuan khusus, diantaranya mencakup:

- a. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menyusun rencana program
- b. Menyediakan data yang membantu pengambilan keputusan mengenai program, berkaitan dengan kelanjutan, perluasan, atau penghentian program
- c. Memberikan masukan untuk menentukan perubahan, perbaikan, atau penyesuaian program
- d. Memberikan informasi dan gambaran terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat program
- e. Menjadi bahan pertimbangan dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggara atau pengelola program
- f. Menyediakan data yang menjadi dasar ilmiah bagi pelaksanaan evaluasi program pendidikan masyarakat.

2.1.2. Konsep Evaluasi Program

2.1.2.1. Pengertian Evaluasi Program

Menurut Stufflebeam, dkk (1971) dalam (Malik Ibrahim, 2018, hlm. 1) evaluasi adalah suatu proses dalam menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi atau data yang digunakan untuk merumuskan alternatif keputusan. Evaluasi memiliki standar atau kriteria dalam menilai keberhasilan suatu program, di mana standar atau kriteria yang telah ditentukan tersebut dijadikan acuan untuk

melihat ketercapaian suatu program, kesesuaian dengan tujuan yang diharapkan, keefektivan, keefisienan, dan kendala yang dijumpai dalam suatu program (Malik Ibrahim, 2018, hlm. 2).

Sejalan dengan hal tersebut, Arifin (2019) dalam (Hamim et al., 2022, hlm 28) menyatakan bahwa evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk menilai sejauh mana program tersebut berjalan secara efektif dan efisien, mengukur tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan, menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang telah dirancang, mengidentifikasi dampak yang muncul setelah program dilaksanakan, meninjau kelebihan serta kekurangan program, serta menyediakan data dan informasi yang berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait program. Menurut Malik Ibrahim (2018, hlm. 2) pengertian evaluasi muncul dari berbagai perspektif, beberapa diantaranya menyatakan bahwa evaluasi adalah penelitian sistematis dan teratur mengenai manfaat atau kegunaan dalam suatu objek. Kemudian Rutman *and* Mowbray (1983) dalam (Malik Ibrahim, 2018, hlm 2) juga mendefinisikan evaluasi sebagai penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi suatu program untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan temuan tersebut, evaluasi program berarti proses sistematis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana program dapat berjalan sesuai dengan standar atau kriteria yang sudah ditetapkan.

2.1.2.2. Tujuan Evaluasi Program

Menurut Malik Ibrahim (2018, hlm. 7) salah satu tujuan dari evaluasi program adalah diperolehnya informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi yang dimaksud meliputi proses pelaksanaan, dampak atau hasil yang dicapai oleh program, dan pemanfaatan hasil dari evaluasi yang difokuskan untuk program. Hal ini sejalan dengan Darodjat & M (2015, hlm 3) bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat tingkat keberhasilan program, yang nantinya menjerumus pada pengambilan keputusan apakah program akan diteruskan, ditingkatkan, diperbaiki, diterima, atau ditolak.

Sejalan dengan Oktavianti, dkk (2024, hlm 158) tujuan dari evaluasi adalah sebagai alat penyedia data atau informasi yang diberikan, sebagai bahan pengambilan keputusan di masa depan baik itu kelanjutan, perbaikan, atau bahkan

penghentian program/kebijakan. Maka dari itu dapat diartikan bahwa evaluasi program ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dengan melihat mulai dari proses pelaksanaan hingga keputusan apakah program dapat dilanjutkan atau tidak, dapat diperbaiki, serta dapat diterima atau bahkan ditolak.

2.1.2.3.Fungsi Evaluasi Program

Menurut Djuju Sudjana (2008, hlm. 100) fungsi dari evaluasi program adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data sebagai masukan bagi pengambil keputusan mengenai program yang sedang/telah dilaksanakan. Menurut Scriven dalam (Diana, Nizar, 2023) evaluasi memiliki dua fungsi yang dipakai yaitu fungsi formatif yakni evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang dilaksanakan, sementara untuk fungsi sumatif yaitu evaluasi yang digunakan untuk pertanggungjawaban, pemberian keterangan, dan tindak lanjut dari evaluasi. Menurut Tayipnapi (1989:3) dalam (Malik Ibrahim, 2018, hlm. 48) menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi evaluasi yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif, di mana fungsi formatif digunakan untuk perbaikan dan pengembangan program yang sedang berjalan, sedangkan fungsi sumatif digunakan untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan sehingga evaluasi ini hendaknya dapat mampu membantu pengembangan, implementasi, dan perbaikan suatu program.

Dapat diartikan, evaluasi program berfungsi sebagai proses yang sistematis untuk mengumpulkan dan mengolah informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, dalam hal ini evaluasi tidak hanya membantu memperbaiki atau mengembangkan program yang sedang berjalan atau yang disebut fungsi formatif, tetapi juga memberikan pertanggungjawaban mengenai hasil pelaksanaan program (fungsi sumatif). Dengan demikian, evaluasi sangat berfungsi untuk memastikan program berjalan efektif sekaligus memberikan informasi untuk perbaikan dan keberlanjutan.

2.1.2.4.Model Evaluasi Program

Menurut Malik Ibrahim (2018, hlm. 17) Model evaluasi adalah suatu desain yang dibuat dan disusun oleh pakar evaluasi yang biasanya dibuat berdasarkan kepentingan suatu lembaga atau instansi yang ingin mengetahui ketercapaian hasil

dari program yang sudah dilaksanakan apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Dengan keragaman model evaluasi yang saat ini sudah digunakan oleh para peneliti, umumnya model evaluasi yang digunakan sesuai dengan alur sistem yang terdiri dari *input* – proses – *output* dengan istilah-istilah didalamnya.

Menurut Philips (1981: 44-50) dalam (Malik Ibrahim, 2018, hlm. 18) menjelaskan bahwa terdapat ilustrasi penerapan tujuh macam model evaluasi program yaitu:

- a. Krikpatrick *approach*, model ini diterapkan untuk mengevaluasi program pelatihan, dengan pengembangan kerangka kerja dalam pengumpulan data penelitian yang secara konseptual mengacu pada tahap pembelajaran. Konsep tersebut selanjutnya dinamakan empat level evaluasi diantaranya terdiri dari: a) *reaction*, b) *learning*, c) *behaviour*, dan d) *result*.
- b. CIPP (*Context, Input, Process, and Product*), model yang digagas oleh Stufflebeam dan dikembangkan oleh *National Study Committee on Evaluation of Phi Delta Kappa*. Jika model ini di klasifikasikan berdasarkan tujuan, maka model ini termasuk model *management analysis* yang bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan atau keputusan seorang manajer. Pada komponen evaluasi *product* dalam model ini program jangka panjang dapat diperluas lagi menjadi evaluasi *impact, effectiveness, sustainability, dan transportability*.
- c. *The Ball System approach* merupakan model evaluasi 4 level dari Kirkpatrick yang lebih banyak dilakukan pada dampaknya. Data evaluasi pada model ini diklasifikasikan menjadi empat yaitu: *reaction outcomes, capability outcomes, application outcomes, dan worth outcomes*.
- d. *The CIRO approach*, merupakan singkatan dari *Context Evaluation, Input Evaluation, Reaction Evaluation, dan Outcomes Evaluation*. Model ini hampir sama dengan CIPP hanya saja proses diganti dengan *reaction*.
- e. *Saratoga Institute approach*, model ini digunakan untuk mengevaluasi program pelatihan yang diklasifikasikan menjadi 4 macam terdiri dari: *training satisfaction, learning change, behavior change, dan organizational change*.
- f. *The IBM approach*, data yang dikumpulkan dalam model ini diklasifikasi menjadi 4 macam yaitu: *reaction, testing, application, dan business results*.

- g. *Xerrox approach*, sama seperti model evaluasi lainnya, model ini mengklasifikasikan data menjadi 4 macam terdiri dari: *entry capability*, *end-of-course performance*, *mastery job performance*, dan *organizational performance*.

Faizin & Kusumaningrum (2023, hlm 45) mengemukakan jenis-jenis model evaluasi yang mengadopsi dari model-model evaluasi program pendidikan, diantaranya:

- a. *Provus Discrepancy Evaluation Model* (DEM), merupakan model evaluasi yang dikembangkan oleh Malcon M. Provus berangkat dari asumsi bahwa untuk mengetahui kelayakan suatu program, evaluator membandingkan antara sesuatu yang seharusnya terjadi dan diharapkan terjadi (*standard*) dengan apa yang sebenarnya terjadi (*performance*) sehingga ada tidaknya kesenjangan (*discrepancy*). Model ini bertujuan untuk menentukan kelayakan suatu program dilihat dari terdefinisiannya *standard*, *performance*, dan *discrepancy* secara rinci.
- b. *Four Level Evaluation Krikpatrick*, merupakan model evaluasi yang mengembangkan empat tingkat untuk mengevaluasi program yaitu Level 1 *Reaction*, Level 2 *Training*, Level 3 *Behavior*, dan Level 4 *Result*.
- c. *Countenance Evaluation Model*, atau yang disebut evaluasi responsif merupakan model evaluasi yang digagas oleh Robert Stake. Menurutnya bahwa evaluasi dapat disebut responsif jika sudah terpenuhi 3 kriteria, 1) orientasi pada aktivitas daripada tujuan; 2) merespon kebutuhan informasi; 3) perspektif nilai berbeda dari setiap orang dilayani sebagai bentuk kesuksesan atau kegagalan program. Menurut (Stake, 2004) Berikut menggambarkan deskripsi dan tahapan model evaluasi *countenance* dalam bentuk diagram

Sumber: (Faizin & Kusumaningrum, 2023, hlm 48)

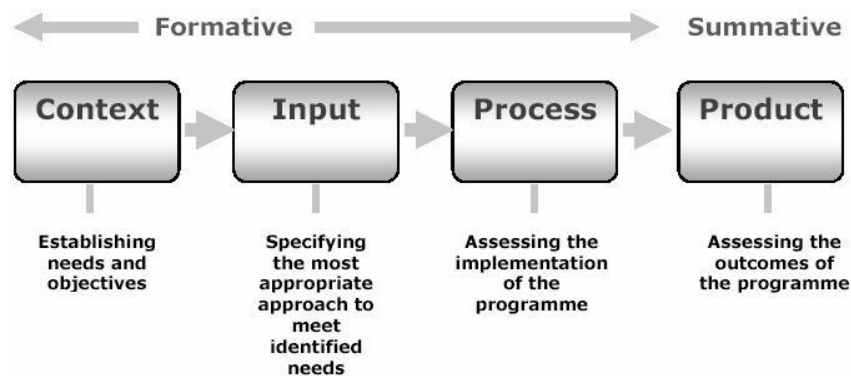
- Berdasarkan penjelasan dari penelitian sebelumnya sekaitan dengan model-model evaluasi dapat disimpulkan bahwa model-model evaluasi tersebut memiliki karakteristik, tingkatan, dan kriteria yang berbeda-beda, namun tidak lain bertujuan

untuk memberikan perbaikan untuk program yang sedang berlangsung maupun program yang sudah dilaksanakan.

2.1.2.5. Model Evaluasi CIPP

Model Evaluasi CIPP merupakan suatu rancangan yang disusun oleh evaluator dalam melaksanakan evaluasi program atau kebijakan agar mendapatkan perbaikan. Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) merupakan pendekatan komprehensif yang dikembangkan oleh Stufflebeam pada akhir tahun 1960, model ini menyediakan petunjuk untuk menilai suatu program dan menekankan pentingnya memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan peningkatan program (Faizin & Kusumaningrum, 2023, hlm 51). Menurut Madaus, Scriven, Stufflebeam (1993:118) dalam (Darodjat & M, 2015, hlm 5), tujuan penting dalam model evaluasi ini adalah untuk memperbaiki, dikatakan bahwa “*the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but to improve*” yang berarti model CIPP ini dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki suatu program bukan hanya untuk membuktikan efektivitas program. Model evaluasi ini menjadi kerangka komprehensif yang didalamnya terdapat aspek-aspek terkait dengan program atau kebijakan yang dievaluasi. Hal tersebut memungkinkan evaluator dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program tersebut (Pujianto, 2023, hlm 72).

Dapat disimpulkan, bahwa model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) merupakan pendekatan yang memberikan kerangka komprehensif meliputi konteks, masukan, proses, dan hasil yang digunakan untuk mendalami informasi terkait program atau kebijakan guna memberikan rekomendasi perbaikan terhadap program tersebut. Dalam model evaluasi CIPP, terdapat empat komponen yaitu *context*, *input*, *process*, dan *product* yang kemudian disingkat menjadi CIPP. Keempat komponen tersebut masing-masing memiliki pemaknaan yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu program atau kebijakan. Menurut Stufflebeam & Shinkfield (1985) dalam (Darodjat & M, 2015, hlm 5) menjelaskan keempat komponen tersebut.



Gambar 2.2. Model Evaluasi CIPP

Sumber: (Malik Ibrahim, 2018, hlm 21)

2.1.2.6. Komponen Model Evaluasi CIPP

a. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Stufflebeam & Shinkfield (1985:169-172) dalam Darodjat & M (2015, hlm 5) menjelaskan bahwa evaluasi konteks adalah

“To assess the object’s overall status, to identify its deficiencies, to identify strengths at hand that could be used to remedy the deficiencies, to diagnose problems whose solution would improve that object’s well-being, and, in general, to characterize the problem’s environment. A context evaluation also is aimed at examining whether exiting goals and priorities are attuned to the needs of whoever is supposed to be served.”

Dalam kutipan tersebut, evaluasi konteks digunakan untuk memeriksa keselarasan antara tujuan dan prioritas dengan kebutuhan masyarakat. Menilai status dari keseluruhan objek, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan, serta menganalisis karakter masalah di lingkungan tersebut. Faktor-faktor yang dapat dianalisis dan dipahami secara mendalam diantaranya seperti kebutuhan, masalah, dan peluang yang ada dalam program atau kebijakan (Pujianto, 2023, hlm 72).

b. Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Menurut Stufflebeam & Shinkfield (1985: 173) Evaluasi *input* adalah cara menentukan ketercapaian tujuan program, di mana evaluasi masukan ini dapat membantu mengatur keputusan, menentukan sumber daya yang ada, alternatif yang diambil, strategi dan rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan, serta prosedur kerja. Komponen evaluasi masukan meliputi: sumber daya manusia, peralatan

pendukung, dana/anggaran yang digunakan, serta prosedur yang digunakan dalam program. Tujuan dari komponen evaluasi ini adalah untuk menilai kecukupan dan kelayakan sumber daya yang tersedia, serta untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan program atau suatu kebijakan (Septiani et al., 2021, hlm 109).

c. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi proses berfungsi untuk mengidentifikasi atau memprediksi kesesuaian rancangan prosedur maupun pelaksanaannya selama tahap implementasi. Evaluasi ini memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan program sekaligus menjadi dokumentasi atau catatan dari prosedur yang telah dilaksanakan. Kegiatan evaluasi proses mencakup pengumpulan data sesuai indikator penilaian yang telah ditetapkan dan diaplikasikan dalam praktik pelaksanaan program (Darodjat & M, 2015, hlm 7). Selaras dengan yang dijelaskan oleh Stufflebeam & Shinkfield (1985: 173) bahwa evaluasi proses mengecek pelaksanaan program di mana ditujukan untuk memberikan *feedback* terhadap aktivitas program yang berjalan sesuai rencana, mengevaluasi secara berkala keterlibatan seseorang dalam aktivitas program.

d. Evaluasi Hasil (*Product Evaluation*)

Stufflebeam & Shinkfield (1985: 176) dalam (Darodjat & M, 2015, hlm 8) menjelaskan bahwa tujuan dari *product evaluation* adalah untuk mengukur, menggambarkan, dan menafsirkan hasil dari suatu program, memastikan apakah suatu program sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum. Sejalan dengan (Hamim et al., 2022, hlm 28) bahwa evaluasi hasil adalah bentuk penilaian yang dilakukan untuk meninjau sejauh mana suatu program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap ini, evaluator memiliki peran penting untuk memberikan rekomendasi kepada pihak terkait mengenai kelanjutan program, apakah perlu diteruskan, disempurnakan atau dimodifikasi, maupun dihentikan apabila dinilai kurang efektif.

2.1.3. Pengelolaan Sampah

2.1.3.1. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengertian sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengelolaan sampah merupakan proses sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam hal ini, pengelolaan sampah bertujuan untuk mengubah sampah menjadi nilai ekonomi dan tidak membahayakan bagi lingkungan (Haerani et al., 2019, hlm 1). Saat ini pengelolaan sampah masih menggunakan metode konvensional, di mana alur pengelolaan dengan mekanisme pengumpulan, pengangkutan, dan penimbunan sampah sehingga sampah yang terkumpul di satu tempat kemudian diangkut dan selanjutnya dibuang ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) atau biasa disingkat menjadi kumpul, angkut, dan buang.

Menurut UU-18/2008 dalam (Damanhuri & Padmi, 2019, hlm. 61) menjelaskan bahwa terdapat 2 kelompok utama dalam pengelolaan sampah, yaitu meliputi:

- a. Pengurangan sampah (*waste minimation*), yaitu upaya yang dilakukan oleh semua pihak untuk mengurangi sampah semaksimal mungkin dengan bagian sampah atau sisa sampah selanjutnya melalui tahap pengolahan (*treatment*) maupun lahan-pengerukan. Upaya pengurangan sampah inilah dilakukan meliputi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), di mana ketiga pendekatan tersebut bertujuan untuk meminimalisir limbah yang harus dikelola agar limbah yang dilepas ke lingkungan dapat seminimal mungkin dengan tingkat bahaya yang minimal juga. Pada tahap ini, pemilahan sampah menjadi upaya pertama yang harus dilakukan untuk mendukung upaya pengurangan sampah.
- b. Penanganan sampah (*waste handling*) yaitu langkah lanjutan dari aktivitas pengurangan sampah, yang menjadi prosedur baku teknik operasional pengelolaan sampah yang saat ini dilakukan. Dalam hal ini, (Budijaya, 2023, hlm 69) menyatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan upaya penanganan yang dilakukan untuk berkontribusi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup pada perlindungan lingkungan

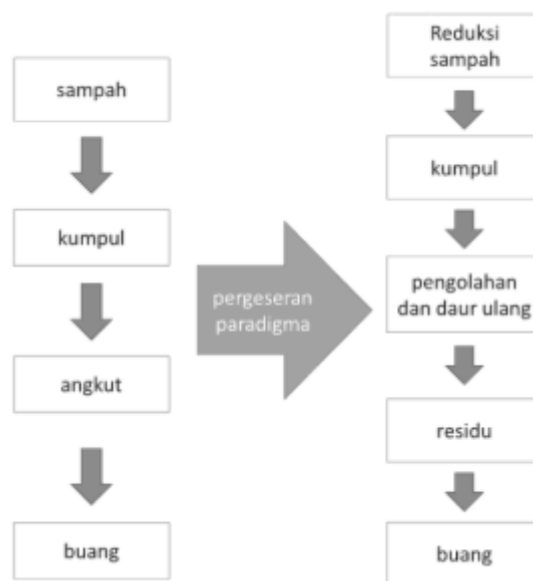
hidup, kesejahteraan sosial, dan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan sampah atau *waste management* juga didefinisikan sebagai upaya mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang ada (Tampubolon et al., 2022, hlm 55). Kemudian Haerani et al., (2019, hlm 267) menegaskan bahwa pengelolaan dalam penanganan sampah meliputi:

- 1) Pemilahan, yakni bentuk pemisahan dan pengelompokan sampah disesuaikan dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.
- 2) Pengumpulan sampah dengan proses pemindahan sampah dari sumber sampah yang selanjutnya diteruskan ke tempat penampungan sementara (TPS).
- 3) Pengangkutan, yaitu membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sementara dengan menggunakan bantuan alat atau kendaraan pengangkut tertentu menuju tempat pemrosesan akhir (TPA).
- 4) Pengolahan, yaitu mengubah bentuk, menambahkan nilai, ataupun menambahkan komponen sehingga sampah yang awalnya tidak bernilai menjadi memiliki nilai ekonomi dan bernilai jual.
- 5) Pemrosesan akhir, merupakan tempat pengembalian sampah residu (sampah yang tidak dapat diolah) untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwendah et al., (2022, hlm 126) bahwa hal-hal yang terdapat pada pengelolaan sampah yang terdiri dari pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan dan erat kaitannya dengan respon masyarakat terhadap pengelolaan sampah itu sendiri. Pengelolaan sampah merupakan upaya untuk mengestimasi kemampuan daya tampung dalam mengintensifkan suatu lahan sehingga tujuan untuk melindungi fasilitas sosial, dan merealisasikan penunjang dalam sektor strategis (Ahsanti & Husen, 2022, hlm 22). Pengelolaan sampah bukan hanya tanggungjawab dari pemerintah atau instansi tertentu tetapi menjadi tanggungjawab bersama, memerlukan keterlibatan seluruh pihak baik dari pihak swasta maupun masyarakat sipil (Budijaya, 2023, hlm 64). Maka dari itu, pengelolaan sampah

tentunya menjadi permasalahan bersama dan harus menjadi tanggungjawab bersama pula mulai dari pengurangan hingga pemosresan akhir.

Di era moderanisasi saat ini, sudah saatnya mengubah paradigma dari pengelolaan sampah mulanya dari sistem kumpul angkut dan buang menjadi paradigma baru yang mengadopsi prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R) sehingga menekankan pada upaya pengurangan sampah.



Gambar 2.3. Perubahan Paradigma Pengolahan Sampah

Sumber: (Purnomo, 2021, hlm. 19)

Paradigma baru dalam pengelolaan sampah berbasis 3R menekankan upaya pengurangan sampah sehingga yang masuk ke TPA hanya menyisakan residu saja. Pada tahapan konsep paradigma baru pengelolaan sampah, diawali dengan mereduksi sampah atau pemilahan sampah dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemilahan sampah baik itu sejak dari rumah atau di suatu lokasi. Kemudian jika sampah sudah terkumpul dan tersortir, dilakukan pengolahan dan daur ulang sampah sehingga nantinya akan menghasilkan sampah residu hasil dari pengolahan sampah, residu tersebut yang nantinya berakhir di TPA (Purnomo, 2021, hlm. 20).

2.1.3.2. Pendekatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM)

Menurut Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (2009) dalam (Wahyono et al., 2016, hlm 76) Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM) merupakan pendekatan pengelolaan sampah yang berdasar pada

kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi. Sehingga dalam pelaksanaannya, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memelihara operasional dan sistem dalam pengelolaan sampah. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Ahsanti & Husen (2022, hlm 23) menyatakan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah, keberhasilan pengelolaan sampah bergantung pada kesadaran, dan keterlibatan masyarakat dalam keikutsertaannya mengelola sampah secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan pengabdian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2022, hlm 229) terkait kegiatan pemilahan sampah yang melibatkan masyarakat, menunjukkan kekuatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah sangat besar, masyarakat dapat dilibatkan mulai dari perencanaan hingga keberlanjutan program yang dilakukan sehingga masyarakat itu sendiri yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat, institusi pemerintah dan lembaga lainnya hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator, sehingga pada praktiknya didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Selaras dengan hal tersebut, Purwendah et al. (2022, hlm 132) menyatakan bahwa pendekatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sudah seharusnya menjadi suatu kebutuhan, sehingga nantinya tidak akan berimbas pada efektivitas dan akan terus berlanjut ketika masyarakat sudah berupaya melakukan pengelolaan sampahnya secara mandiri baik itu dilakukan di rumah masing-masing maupun di lingkungannya.

Sebagaimana yang telah didefinisikan diatas, maka pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan sampah yang mana mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya melibatkan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan mereka.

2.1.4. Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*)

Penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) merupakan strategi yang dirancang dalam pengelolaan sampah berkelanjutan untuk mencapai target nasional pada tahun 2025, prinsip ini diterapkan untuk memperbaiki sistem

pengelolaan sampah sehingga menghilangkan tindakan pembakaran sampah, atau tindakan membuang sampah sembarangan (Brotosusilo, A., & Naldi, 2021). Prinsip 3R ini telah muncul sebagai solusi penting dalam menindaklanjuti tantangan pengelolaan sampah yang memusatkan pada tiga tahapan yang harus dilakukan diantaranya; 1) *Reduce* (mengurangi), 2) *Reuse* (menggunakan kembali), 3) *Recycle* (mendaur ulang).

Dalam praktiknya, prinsip 3R ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan, salah satunya adalah mengurangi beban dari sistem pengelolaan sampah di perkotaan, kemudian dengan menggunakan kembali barang yang masih bisa terpakai akan mengurangi permintaan barang baru sehingga dapat menghemat sumber daya alam yang digunakan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 yang secara spesifik menjelaskan urgensi transisi pengelolaan sampah konvensional menuju pendekatan yang berfokus pada pengelolaan sampah berbasis 3R yang didalamnya terdapat upaya pengurangan dan penanganan sampah.

a. *Reduce* (Mengurangi/Pembatasan)

Langkah pertama dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R adalah *reduce* atau mengurangi timbulan sampah. Prinsip ini dilakukan dengan meminimalisir atau mengurangi barang atau material yang seringkali kita gunakan karena semakin banyak barang yang kita gunakan, semakin banyak timbulan sampah yang dihasilkan (Fikri et al., 2022, hlm 85). Upaya pengurangan sampah ini dapat dilakukan dari kehidupan sehari-hari, seperti membawa tas belanja sendiri sehingga tidak menggunakan plastik sekali pakai, kemudian membawa dan menggunakan botol minum sendiri sehingga mengurangi timbulan sampah botol plastik sekali pakai.

b. *Reuse* (Menggunakan Kembali)

Konsep *reuse* ini menekankan pemanfaatan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai untuk digunakan dengan fungsi yang sama atau berbeda sehingga dapat memperpanjang siklus hidup produk dan mengurangi kebutuhan akan produksi baru (Ramdhon et al., 2023, hlm. 4). Praktik ini mencakup seperti menggunakan kembali botol kaca, menyumbangkan pakaian

yang sudah tidak terpakai kepada pihak lain yang membutuhkan, atau mengolah kembali potongan pakaian untuk dijadikan kain atau pakaian utuh.

c. *Recycle* (Mendaur Ulang)

Prinsip mendaur ulang sampah melibatkan pengolahan sampah menjadi produk baru yang memiliki nilai, karakteristik, dan bisa digunakan serta bernilai jual, seperti dijadikan sebagai lukisan atau dekorasi rumah, mengolah sampah plastik kopi menjadi tas, dompet atau tikar.

Dengan sistem pengelolaan sampah yang berfokus pada pendekatan berbasis 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) akan mendorong masyarakat untuk dapat berperan dalam kegiatan pengelolaan sampah mulai dari sumbernya yang berasal dari masyarakat, maka dari itu penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam penerapan 3R dalam kehidupan sehari-hari (Pusmiati et al., 2025, hlm 495).

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Sebagai upaya untuk mendukung dan memperkuat penelitian ini, maka peneliti merujuk pada sejumlah referensi hasil penelitian yang relevan serta dapat dijadikan sebagai pembanding dan rekomendasi, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Hamim et al. (2022) terkait Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Bank Sampah. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) untuk mengevaluasi keberhasilan Bank Sampah Kembang Hurip Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Fokus penelitian meliputi efektivitas pengelolaan bank sampah, peran masyarakat, dan dampak terhadap lingkungan serta ekonomi warga. Hasil penelitian menemukan bahwa bank sampah berhasil meningkatkan kebiasaan memilah sampah di tingkat rumah tangga dan memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi anggota. Namun, terdapat tantangan berupa kurangnya dukungan kelembagaan dan kurangnya sarana dan prasarana. Penulis merekomendasikan penguatan kelembagaan dan kebijakan dari pemerintah terkait bank sampah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2022) terkait Evaluasi Program Pemanfaatan dan Peningkatan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kota Pangkalpinang. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Proses, Produk*) untuk menilai program pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program yang telah berjalan sudah cukup baik dan memenuhi kriteria evaluasi, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas pengangkutan dan minimnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah. Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini adalah peningkatan sosialisasi, penyediaan fasilitas yang memadai, dan pelatihan berkelanjutan bagi para petugas pengelola sampah.

Penelitian yang diinisiasi oleh Oktavianti, Nugraha, Mali (2024) dengan judul “Evaluasi Program Penanganan Prasarana dan Umum (PPSU) terhadap Pengelolaan Sampah di Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Fokus penelitian adalah efektivitas peran PPSU dalam pengelolaan sampah harian, tingkat kebersihan lingkungan, dan respon masyarakat terhadap program PPSU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PPSU membantu mempercepat pengangkutan sampah dan meningkatkan kebersihan wilayah. Namun, masih terdapat keterbatasan dan kendala yaitu pelaksanaan pengumpulan sampah yang kurang merata, sistem pencatatan yang kurang efektif, dan hambatan dalam pengelolaan sampah organik. Penulis menyarankan peningkatan jumlah petugas, penyediaan peralatan yang lebih memadai, dan program pemberdayaan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian diatas menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, ketersediaan sarana prasarana, dukungan kelembagaan, serta efektivitas implementasi kebijakan/program. Hasilnya secara konsisten menunjukkan perlunya pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait agar pengelolaan sampah menjadi lebih optimal dan berkelanjutan.

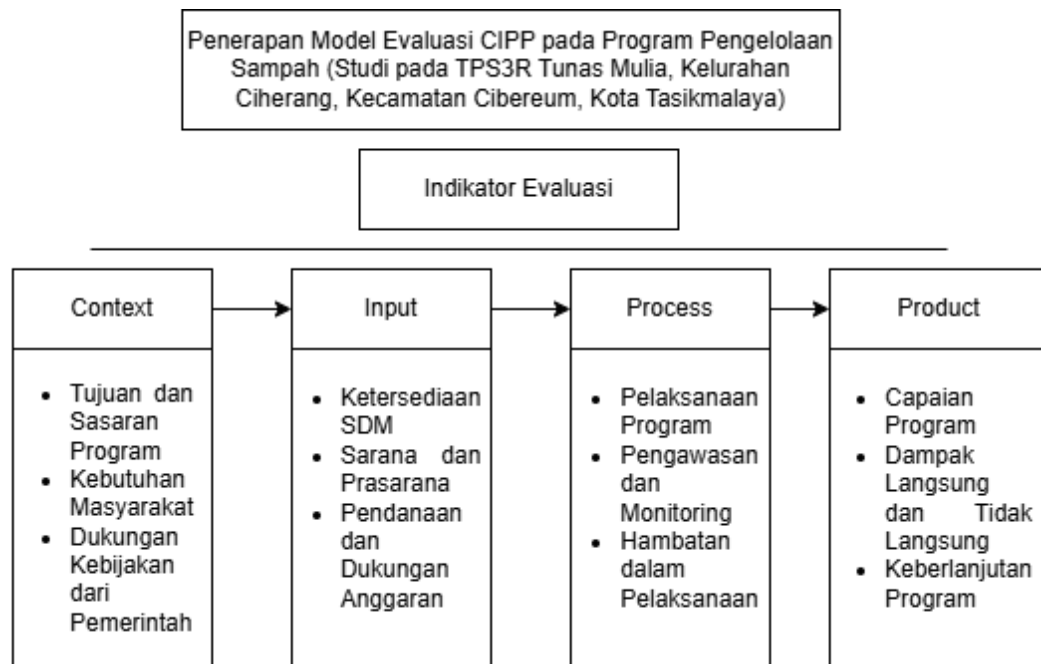
2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alat pengorganisasi visual yang secara definitif mengarahkan dan memandu penelitian dalam ilmu sosial. Dalam pengelolaan sampah, hal ini mencakup pada upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mengurangi, mendaur, ulang, dan menangani sampah guna untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan (Simanungkalit et al., 2025, hlm 13218).

Adapun alur kerangka konseptual yang dijelaskan pada penelitian ini dengan judul Penerapan Model Evaluasi CIPP pada Program Pengelolaan Sampah (Studi pada TPS3R Tunas Mulia, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya) dibentuk untuk mengevaluasi program yang ditinjau secara komprehensif berdasarkan indikator evaluasi dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) menurut Stufflebeam & Shinkfield yaitu terdiri dari:

- a. *Context* (konteks), menggambarkan latar belakang, kebutuhan, dan kesesuaian tujuan program
- b. *Input* (masukan), menilai ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta pendanaan dan dukungan anggaran
- c. *Process* (proses) dalam pelaksanaan program, pengawasan dan monitoring, dan hambatan dalam pelaksanaan program
- d. *Product* (hasil) menilai capaian dari pelaksanaan program, dampak langsung dan tidak langsung, serta keberlanjutan program.

Model evaluasi CIPP digunakan bukan hanya sebagai alat penilaian hasil akhir tetapi alat untuk memperbaiki program secara berkelanjutan, sehingga keberadaan keempat komponen dalam model evaluasi CIPP ini saling berhubungan dan saling berpengaruh secara berjenjang, hubungannya bersifat sekuensial dan sistematis yang mana hasil dari satu komponen dapat menjadi dasar bagi komponen berikutnya.



Gambar 2.4. Kerangka Konseptual

Sumber: Peneliti, 2025